



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TA. 2009**

BUPATI NATUNA

- Menimbang : a. bahwa pupuk merupakan unsur yang sangat penting dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan baik Nasional maupun Regional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pupuk berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa dengan ditetapkannya pupuk bersubsidi, maka pengadaan, penyaluran dan distribusi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sampai ke tingkat petani perlu pengawasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/M tahun 2005, tanggal 13 agustus 2005, Tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. IsmetH ABDULLAH dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Riau Periode 2005-2010;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan/ OT.140/ 4/ 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada padi sawah spesifik lokasi;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/ permentan/OT.140/4/09 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Untuk Sektor Pertanian TA. 2009
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata cara pengawasan barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 08/TP/260/1/2003 tentang Pedoman dan Tata cara Pendaftaran Pupuk An Organik
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Pupuk An Organik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An Organik;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;

MEMUTUSKAN :

Menerapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
5. Pupuk An Organik adalah Pupuk hasil dari Proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil Industri atau pabrik pembuat pupuk;
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipengecer resmi di Lini IV.
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
9. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
10. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan Lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
11. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijau pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.

12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik dalam negeri.
14. Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan, badan hukum yang di tunjuk yang sah dan ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar diwilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani dan atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuk.
15. Pengecer Resmi selanjutnya disebut pengecer adalah perorangan, kelompok tani dan badan baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum, yang berdudukan di Kecamatan dan /atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani dan atau Kelompok Tani.
16. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahan tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
17. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidayaan ikan dan atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah kordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Tingkat Provinsi dan oleh Bupati / Walikota untuk tingkat Kabupaten /Kota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

1. Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam perkeluarga petani, kecuali pembudidaya ikan dan atau udang
2. Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

1. Alokasi pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut lanjut menurut Kabupaten, jenis, jumlah dan sebaran bulanan diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
3. Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) yang disetujui petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
4. Dinas yang membidangi tanaman pangan, Holtikultura, peternakan, perkebunan, dan Budidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya.

Pasal 4

1. Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
2. Realokasi antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
3. Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat, sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan.
4. Apabila Alokasi pupuk bersubsidi disuatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi diwilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

1. Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an organik (Urea, ZA, Superphos, NPK) dan pupuk organik.

2. Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

1. Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepenyalur lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian.
2. Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dipenyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan Wilayah tanggungjawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV kepetani atau kelompok tani sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Pemerintah daerah Kabupaten melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
5. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

Pasal 7

1. Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan **"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"**
Barang Dalam Pengawasan
mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus
2. Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai dengan bulan april 2009

Pasal 8

1. Penyalur di Lini harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

2. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea Rp. 1.200,- per kg
 - b. Pupuk ZA Rp. 1.050,- per kg
 - c. Pupuk Superphos Rp. 1.550,- per kg
 - d. Pupuk NPK phonska (15:15:15) Rp. 1.750,- per kg
 - e. Pupuk NPK pelangi (20:10:10) Rp. 1.830,- per kg
 - f. Pupuk NPK kujang (30:6:8) Rp. 1.586,- per kg
 - g. Pupuk Organik Rp. 500,- per kg
3. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang secara tunai dipenyialur Lini IV.

Pasal 9

1. Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang diwilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk menamin ketersediaan pupuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian; bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi aloksinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 11

1. Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi lintas Kabupaten.
2. Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Wilayahnya.
3. Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan tenaga bantu pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit.

Pasal 12

1. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/ Kota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
2. Bupati/ Walikota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
3. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 4 FEBRUARI 2009

BUPATI NATUNA

BAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai

Pada Tanggal 4 FEBRUARI 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

ILYAS SABL

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009 NOMOR 3

LAMPIRAN 1. PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 3 TAHUN 2009
TANGGAL: 4 FEBRUARI 2009

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (TON)					JUMLAH
		UREA	SUPERPHOS	ZA	NPK	ORGANIK	
1	BUNGURAN TIMUR	16.50	6.25	0.37	10.46	10.00	43.58
2	BUNGURAN BARAT	35.00	13.50	0.96	14.15	15.55	79.16
3	BUNGURAN TENGAH	18.39	7.25	0.60	13.14	7.00	46.38
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	7.82	1.58	0.48	5.24	2.61	17.73
5	BUNGURAN UTARA	6.24	2.41	0.20	5.05	2.84	16.73
6	SERASAN	7.00	3.04	0.20	8.55	3.86	22.65
7	SUBI	5.50	3.85	0.15	5.04	3.06	17.60
8	MIDAI	8.00	1.75	0.34	7.13	5.23	22.45
9	PULAU LAUT	4.00	2.25	0.40	4.25	0.00	10.90
10	PULAU TIGA	5.50	3.35	0.15	4.25	0.00	13.25
11	BUNGURAN SELATAN	15.00	3.00	0.70	9.00	9.85	37.55
12	SERASAN TIMUR	11.05	1.78	0.45	7.74	0.00	21.02
JUMLAH		140.00	50.00	5.00	94.00	60.00	349.00

BUPATI NATUNA

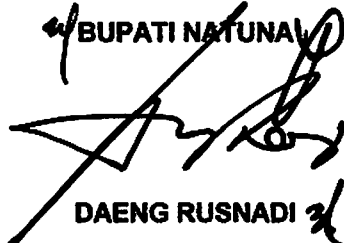
DAENG RUSNADI

LAMPIRAN 2. PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 3 TAHUN 2009
TANGGAL: 4 FEBRUARI 2009

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
PERKECAMATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (TON)					JUMLAH
		UREA	SUPERPHOS	ZA	NPK	ORGANIK	
1	BUNGURAN TIMUR	10.00	3.00	0.17	7.72	10.00	30.89
2	BUNGURAN BARAT	30.00	10.00	0.51	10.00	15.55	66.06
3	BUNGURAN TENGAH	11.39	6.00	0.40	10.00	7.00	34.79
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	1.82	0.08	0.03	0.99	2.61	5.53
5	BUNGURAN UTARA	4.24	1.41	0.00	3.05	2.84	11.53
6	SERASAN	3.00	1.79	0.00	5.55	3.86	14.20
7	SUBI	2.00	1.35	0.00	2.64	3.06	9.05
8	MIDAI	3.00	0.50	0.14	4.00	5.23	12.87
9	PULAU LAUT	1.00	1.00	0.25	2.25	0.00	4.50
10	PULAU TIGA	2.00	0.85	0.00	2.25	0.00	5.10
11	BUNGURAN SELATAN	10.00	1.50	0.25	6.00	9.85	27.60
12	SERASAN TIMUR	7.55	0.53	0.25	5.55	0.00	13.88
JUMLAH		86.00	28.00	2.00	60.00	60.00	236.00


BUPATI NATUNA
DAENG RUSNADI

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (TON)					JUMLAH
		UREA	SUPERPHOS	ZA	NPK	ORGANIK	
1	BUNGURAN TIMUR	2.50	0.25	0.00	0.74	0.00	3.49
2	BUNGURAN BARAT	3.00	0.50	0.25	1.65	0.00	5.40
3	BUNGURAN TENGAH	2.00	0.25	0.00	0.14	0.00	2.39
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	3.00	0.50	0.25	1.25	0.00	5.00
5	BUNGURAN UTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	SERASAN	1.00	0.25	0.00	1.00	0.00	2.25
7	SUBI	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
8	MIDAI	2.00	0.25	0.00	0.63	0.00	2.88
9	PULAU LAUT	2.00	0.25	0.00	0.00	0.00	2.25
10	PULAU TIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	BUNGURAN SELATAN	3.00	0.50	0.25	1.00	0.00	4.75
12	SERASAN TIMUR	1.50	0.25	0.00	0.19	0.00	1.94
JUMLAH		20.00	3.00	0.75	7.00	0.00	30.75

**ALOKASI KEBUTUHAN BERSUBSIDI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN PERKECAMATAN
KAB. NATUNA TAHUN 2009**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (TON)					JUMLAH
		UREA	SUPERPHOS	ZA	NPK	ORGANIK	
1	BUNGURAN TIMUR	3.00	2.00	0.20	2.00	0.00	7.20
2	BUNGURAN BARAT	4.00	2.00	0.20	2.50	0.00	8.70
3	BUNGURAN TENGAH	4.00	2.00	0.20	3.00	0.00	9.20
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	2.00	1.00	0.20	3.00	0.00	6.20
5	BUNGURAN UTARA	3.00	1.00	0.20	2.00	0.00	6.20
6	SERASAN	2.00	1.00	0.20	2.00	0.00	5.20
7	SUBI	3.00	1.00	0.15	2.00	0.00	6.15
8	MIDAI	1.00	1.00	0.20	2.50	0.00	4.70
9	PULAU LAUT	2.00	1.00	0.15	2.00	0.00	5.15
10	PULAU TIGA	2.00	1.00	0.15	2.00	0.00	5.15
11	BUNGURAN SELATAN	2.00	1.00	0.20	2.00	0.00	5.20
12	SERASAN TIMUR	2.00	1.00	0.20	2.00	0.00	5.20
JUMLAH		30.00	15.00	2.25	27.00	0.00	74.25

**ALOKASI KEBUTUHAN BERSUBSIDI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN PERKECAMATAN
KAB. NATUNA TAHUN 2009**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (TON)					JUMLAH
		UREA	SUPERPHOS	ZA	NPK	ORGANIK	
1	BUNGURAN TIMUR	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2	BUNGURAN BARAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	BUNGURAN TENGAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BUNGURAN UTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	SERASAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SUBI	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00
8	MIDAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	PULAU LAUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	PULAU TIGA	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00
11	BUNGURAN SELATAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	SERASAN TIMUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	8.00

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (TON)					JUMLAH
		UREA	SUPERPHOS	ZA	NPK	ORGANIK	
1	BUNGURAN TIMUR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	BUNGURAN BARAT	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	BUNGURAN TENGAH	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
5	BUNGURAN UTARA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	SERASAN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	SUBI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	MIDAI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	PULAU LAUT	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	PULAU TIGA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.010
11	BUNGURAN SELATAN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12	SERASAN TIMUR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
JUMLAH		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

LAMPIRAN 3. PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 3 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2009

ALOKASI KEBUTUHAN BULANAN PUPUK BERSUBSIDI UREA PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2009

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK PERBULAN (TON)												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	BUNGURAN TIMUR	2.00	1.65	1.30	1.06	0.94	0.83	0.71	0.71	2.24	2.00	1.65	1.41	16.50
2	BUNGURAN BARAT	4.25	3.50	2.75	2.25	2.00	1.75	1.50	1.50	4.75	4.25	3.50	3.00	35.00
3	BUNGURAN TENGAH	2.23	1.84	1.44	1.18	1.05	0.92	0.79	0.79	2.50	2.23	1.84	1.58	18.39
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	0.95	0.78	0.61	0.50	0.45	0.39	0.34	0.34	1.06	0.95	0.78	0.67	7.82
5	BUNGURAN UTARA	0.76	0.62	0.49	0.40	0.36	0.31	0.27	0.27	0.85	0.76	0.62	0.53	6.24
6	SERASAN	0.85	0.70	0.55	0.45	0.40	0.35	0.30	0.30	0.95	0.85	0.70	0.60	7.00
7	SUBI	0.67	0.55	0.43	0.35	0.31	0.28	0.24	0.24	0.75	0.67	0.55	0.47	5.50
8	MIDAI	0.97	0.80	0.63	0.51	0.46	0.40	0.34	0.34	1.09	0.97	0.80	0.69	8.00
9	PULAU LAUT	0.49	0.40	0.31	0.26	0.23	0.20	0.17	0.17	0.54	0.49	0.40	0.34	4.00
10	PULAU TIGA	0.67	0.55	0.43	0.35	0.31	0.28	0.24	0.24	0.75	0.67	0.55	0.47	5.50
11	BUNGURAN SELATAN	1.82	1.50	1.18	0.96	0.86	0.75	0.64	0.64	2.04	1.82	1.50	1.29	15.00
12	SERASAN TIMUR	1.34	1.11	0.87	0.71	0.63	0.55	0.47	0.47	1.50	1.34	1.11	0.95	11.05
JUMLAH		17.00	14.00	11.00	9.00	8.00	7.00	6.00	6.00	19.00	17.00	14.00	12.00	140.00

BUPATI NATUNA
DAENG RUSNADI

**ALOKASI KEBUTUHAN BULANAN PUPUK BERSUBSIDI SUPERPHOS PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK PERBULAN (TON)												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	BUNGURAN TIMUR	0.75	0.63	0.50	0.44	0.38	0.31	0.25	0.25	0.81	0.75	0.63	0.56	6.25
2	BUNGURAN BARAT	1.62	1.35	1.08	0.95	0.81	0.68	0.54	0.54	1.76	1.62	1.35	1.22	13.50
3	BUNGURAN TENGAH	0.87	0.73	0.58	0.51	0.44	0.36	0.29	0.29	0.94	0.87	0.73	0.65	7.25
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.06	0.06	0.21	0.19	0.16	0.14	1.58
5	BUNGURAN UTARA	0.29	0.24	0.19	0.17	0.14	0.12	0.10	0.10	0.31	0.29	0.24	0.22	2.41
6	SERASAN	0.36	0.30	0.24	0.21	0.18	0.15	0.12	0.12	0.40	0.36	0.30	0.27	3.04
7	SUBI	0.46	0.39	0.31	0.27	0.23	0.19	0.15	0.15	0.50	0.46	0.39	0.35	3.85
8	MIDAI	0.21	0.18	0.14	0.12	0.11	0.09	0.07	0.07	0.23	0.21	0.18	0.16	1.75
9	PULAU LAUT	0.27	0.23	0.18	0.16	0.14	0.11	0.09	0.09	0.29	0.27	0.23	0.20	2.25
10	PULAU TIGA	0.40	0.34	0.27	0.23	0.20	0.17	0.13	0.13	0.44	0.40	0.34	0.30	3.35
11	BUNGURAN SELATAN	0.36	0.30	0.24	0.21	0.18	0.15	0.12	0.12	0.39	0.36	0.30	0.27	3.00
12	SERASAN TIMUR	0.21	0.18	0.14	0.12	0.11	0.09	0.07	0.07	0.23	0.21	0.18	0.16	1.78
JUMLAH		6.00	5.00	4.00	3.50	3.00	2.50	2.00	2.00	6.50	6.00	5.00	4.50	50.00

**ALOKASI KEBUTUHAN BULANAN PUPUK BERSUBSIDI NPK PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009**

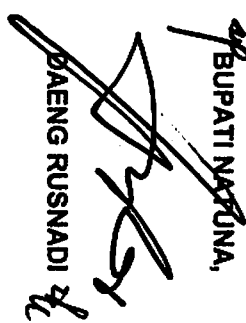
NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK PERBULAN (TON)												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	BUNGURAN TIMUR	1.11	1.00	0.89	0.78	0.67	0.56	0.45	0.45	1.34	1.22	1.00	1.00	10.46
2	BUNGURAN BARAT	1.51	1.35	1.20	1.05	0.90	0.75	0.60	0.60	1.81	1.66	1.35	1.35	14.15
3	BUNGURAN TENGAH	1.40	1.26	1.12	0.98	0.84	0.70	0.56	0.56	1.68	1.54	1.26	1.26	13.14
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	0.56	0.50	0.45	0.39	0.33	0.28	0.22	0.22	0.67	0.61	0.50	0.50	5.24
5	BUNGURAN UTARA	0.54	0.48	0.43	0.38	0.32	0.27	0.21	0.21	0.64	0.59	0.48	0.48	5.05
6	SERASAN	0.91	0.82	0.73	0.64	0.55	0.45	0.36	0.36	1.09	1.00	0.82	0.82	8.55
7	SUBI	0.54	0.48	0.43	0.38	0.32	0.27	0.21	0.21	0.64	0.59	0.48	0.48	5.04
8	MIDAI	0.76	0.68	0.61	0.53	0.46	0.38	0.30	0.30	0.91	0.83	0.68	0.68	7.13
9	PULAU LAUT	0.45	0.41	0.36	0.32	0.27	0.23	0.18	0.18	0.54	0.50	0.41	0.41	4.25
10	PULAU TIGA	0.45	0.41	0.36	0.32	0.27	0.23	0.18	0.18	0.54	0.50	0.41	0.41	4.25
11	BUNGURAN SELATAN	0.96	0.86	0.77	0.67	0.57	0.48	0.38	0.38	1.15	1.05	0.86	0.86	9.00
12	SERASAN TIMUR	0.82	0.74	0.66	0.58	0.49	0.41	0.33	0.33	0.99	0.91	0.74	0.74	7.74
JUMLAH		10.00	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00	4.00	12.00	11.00	9.00	9.00	94.00

**ALOKASI KEBUTUHAN BULANAN PUPUK BERSUBSIDI ZA PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK PERBULAN (TON)												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	BUNGURAN TIMUR	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.04	0.03	0.02	0.37
2	BUNGURAN BARAT	0.13	0.10	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.13	0.10	0.08	0.06	0.96
3	BUNGURAN TENGAH	0.08	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	0.06	0.05	0.04	0.60
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	0.07	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.05	0.04	0.03	0.48
5	BUNGURAN UTARA	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01	0.20
6	SERASAN	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01	0.20
7	SUBI	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.15
8	MIDAI	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.03	0.03	0.02	0.34
9	PULAU LAUT	0.06	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.04	0.03	0.02	0.40
10	PULAU TIGA	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.15
11	BUNGURAN SELATAN	0.10	0.07	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.10	0.07	0.06	0.04	0.70
12	SERASAN TIMUR	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.05	0.04	0.03	0.45
JUMLAH		0.70	0.50	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.70	0.50	0.40	0.30	5.00

**ALOKASI KEBUTUHAN BULANAN PUPUK BERSUBSIDI ORGANIK PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009**

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK PERBULAN (TON)												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	BUNGURAN TIMUR	1.17	1.00	0.83	0.67	0.67	0.50	0.50	0.33	1.33	1.17	1.17	0.67	10.00
2	BUNGURAN BARAT	1.81	1.56	1.30	1.04	1.04	0.78	0.78	0.52	2.07	1.81	1.81	1.04	15.55
3	BUNGURAN TENGAH	0.82	0.70	0.58	0.47	0.47	0.35	0.35	0.23	0.93	0.82	0.82	0.47	7.00
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	0.30	0.26	0.22	0.17	0.17	0.13	0.13	0.09	0.35	0.30	0.30	0.17	2.61
5	BUNGURAN UTARA	0.33	0.28	0.24	0.19	0.19	0.14	0.14	0.09	0.38	0.33	0.33	0.19	2.84
6	SERASAN	0.45	0.39	0.32	0.26	0.26	0.19	0.19	0.13	0.51	0.45	0.45	0.26	3.86
7	SUBI	0.36	0.31	0.26	0.20	0.20	0.15	0.15	0.10	0.41	0.36	0.36	0.20	3.06
8	MIDAI	0.61	0.52	0.44	0.35	0.35	0.26	0.26	0.17	0.70	0.61	0.61	0.35	5.23
9	PULAU LAUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	PULAU TIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	BUNGURAN SELATAN	1.15	0.99	0.82	0.66	0.66	0.49	0.49	0.33	1.31	1.15	1.15	0.66	9.85
12	SERASAN TIMUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH		7.00	6.00	5.00	4.00	4.00	3.00	3.00	2.00	8.00	7.00	7.00	4.00	60.00

BUPATI NATUNA,

PAENG RUSNADI